

ANALISIS PERAN PERGURUAN TINGGI TERHADAP BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA

Rini Kurnia Sari¹, Stephanie Bangapadang Bangapadang², Cecep Hidayat Hidayat³

Management Department, BINUS ONLINE Learning, Bina Nusantara University, Jakarta

Email Korespondensi: rini@binus.ac.id

Dikirim :03-10-2019

Diterima :17-10-2019

ABSTRACT

Government efforts to control population growth have had an impact on changes in the demographic structure of Indonesia's population. The working age population has become larger in number than the non-working age population. This demographic dividend which is expected to continue until 2030 can encourage economic growth and development if accompanied by adequate quality and competitiveness. Therefore, it is necessary to strengthen the role of tertiary institutions through increasing the accessibility of adequate and affordable higher education, improving the quality of higher education institutions, as well as improving the quality of graduates to be highly competitive.

Keywords: *demographic dividend, the role of universities.*

ABSTRAK

Upaya pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk telah berdampak pada perubahan struktur demografi penduduk Indonesia. Penduduk usia produktif telah menjadi lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk usia non-produktif. Bonus demografi yang diperkirakan masih akan terus terjadi hingga tahun 2030 ini dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi apabila disertai kualitas dan daya saing yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran perguruan tinggi melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi yang memadai dan terjangkau, peningkatan kualitas intitusi pendidikan tinggi, serta peningkatan kualitas lulusan yang berdaya saing tinggi.

Kata kunci: bonus demografi, peran perguruan tinggi.

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan fungsi produksi Cobb-Douglas dan fungsi pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan dari model tersebut, maka sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi salah satu modal penting dalam meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Modal manusia menjadi motor penggerak agar suatu negara dapat menghadapi tantangan pembangunan terkait peningkatan kualitas hidup, harga diri bangsa, serta kebebasan. Untuk mewujudkannya, maka pengelolaan modal manusia perlu dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan agar investasi pengembangan manusia menghasilkan *outcomes* yang sesuai.

Salah satu bentuk investasi yang penting bagi modal manusia adalah pendidikan. Menurut Becker (dalam Fahmi & Yeni, 2015:113), pendidikan dapat mengajarkan keahlian-keahlian yang diperlukan pekerja dalam meningkatkan produktivitas dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi bagi pekerja tersebut. Selain itu, Blundell dkk (2000:82) mengemukakan bahwa terdapat tiga kategori manfaat (*return*) dari investasi terhadap pendidikan di tingkat perguruan tinggi, yaitu:

1. Manfaat pribadi terkait keuangan (*private financial returns*) – terutama ditunjukkan oleh tingkat penghasilan yang lebih besar;
2. Manfaat pribadi non-keuangan (*private non-financial returns*) – antara lain ditunjukkan oleh akses kepada jenis pekerjaan yang lebih menarik dan kondisi pekerjaan yang lebih baik; serta
3. Manfaat sosial (*social return*) – ditunjukkan dari manfaat lebih yang diterima diantara anggota masyarakat lainnya.

Sebagai negara terbesar keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 267 juta jiwa, Indonesia memiliki SDM yang melimpah dengan 73,57% penduduk usia produktif (per Februari 2019). Dari jumlah tersebut, sebanyak 69,32% merupakan angkatan kerja dan 30,68% bukan angkatan kerja. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2030. Namun, setelah periode tersebut, Indonesia akan memasuki masa *aging society* dengan peningkatan rasio ketergantungan yang terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas).

Perubahan struktur penduduk Indonesia ini dapat dipandang sebagai peluang untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi apabila disertai dengan kualitas yang baik. Namun, bonus demografi ini juga dapat menjadi bencana bagi pembangunan ekonomi apabila kualitas dan daya saing SDM Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, investasi pada pengembangan modal manusia menjadi tantangan besar yang perlu diatasi oleh lintas institusi/lembaga, termasuk oleh perguruan tinggi yang merupakan lembaga pendidikan yang berperan dalam mempersiapkan angkatan kerja yang produktif. Tantangan ini kemudian menjadi lebih besar manakala produktivitas modal manusia yang tercipta tidak hanya ditunjukkan pada jumlah dan partisipasi sebagai tenaga kerja terdidik dan terampil, tetapi juga pada daya saing yang dimiliki.

B. KAJIAN LITERATUR

Penelitian yang telah dilakukan oleh Benos (2014) menyatakan bahwa pendidikan pada saat ini dianggap penting sebagai investasi dalam sumber daya manusia yang digunakan dalam pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam teori pertumbuhan endogen, dengan pendidikan akan menciptakan inovasi, pengetahuan tentang teknologi baru dan produk, dengan demikian berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Investasi pendidikan memainkan peran penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Investasi pendidikan yang meningkat sebesar 1% akan mengarah pada peningkatan dari produk domestik bruto (PDB) rata-rata sebesar 0,14%. Dengan demikian pemerintah harus meningkatkan investasi pendidikan dan meningkatkan efisiensi layanan untuk mengembangkan lebih banyak bakat dan meningkatkan tingkat kontribusi investasi pendidikan terhadap PDB dalam negeri, Liou (2019).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang disertai dengan analisis deskriptif-kualitatif tentang kondisi Indonesia. Kajian kepustakaan khususnya didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu terkait indikator/variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan, analisis deskriptif-kualitatif didasarkan pada hasil interpretasi data untuk memperjelas korelasi antar-variabel yang dibahas. Adapun data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Penduduk Indonesia

Upaya pengendalian jumlah penduduk Indonesia yang dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB) sejak awal tahun 1990-an telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk per tahun. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang pada tahun 1971-1980 mencapai 2,31% telah berhasil ditekan menjadi 1,49% pada tahun 1990-2000 dan menjadi 1,36% pada tahun 2010-2016. Sebagaimana diuraikan dalam Jati (2015:4), keberhasilan program KB untuk menekan angka fertilitas juga berdampak positif terhadap struktur demografi. Sejak akhir tahun 2000, Indonesia mulai merasakan bonus demografi melalui perkembangan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang lebih dari 100% dibandingkan tahun 1970. Perkembangan jumlah penduduk usia tersebut sekaligus menurunkan beban ketergantungan yang diukur dari rasio penduduk bukan usia kerja terhadap penduduk usia kerja, yaitu dari 85-90% di tahun 1970 menjadi 54-55% di tahun 2000.

Bonus demografi tersebut masih terus meningkat hingga saat ini. Per Februari 2019, jumlah penduduk usia produktif mencapai 73,57%, dimana 69,32% merupakan angkatan kerja dan 30,68% bukan angkatan kerja. Sedangkan, jumlah penduduk usia non-produktif mencapai 26,43%. Dengan demikian, rasio beban ketergantungan telah turun hingga mencapai sekitar 35,93%.

Menurut data proyeksi penduduk Indonesia oleh BPS, bonus demografi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2030. Namun, setelah tahun tersebut, rasio beban ketergantungan akan mulai meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk usia tua. Pada tahun 2045, Indonesia bahkan diperkirakan menjadi *aging society* dengan penduduk usia tua yang mencapai 12,45% dari total penduduk.

Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja

Bonus demografi yang dinikmati Indonesia perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar potensi pertumbuhan ekonomi dapat direalisasikan secara maksimal, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Namun, untuk dapat memanfaatkan dan memaksimalkan kondisi tersebut, kualitas SDM yang dimiliki perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian Alisjahbana (2016:12), pertumbuhan modal manusia tahun 1987-2013 lebih lambat dari pertumbuhan barang modal sehingga kontribusi modal manusia dan produktivitasnya (*total factor productivity*/TFP) terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing hanya sekitar 35% dan 1%. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi produksi maupun permintaan domestik, adalah kapabilitas tenaga kerja yang masih berada pada level mendasar (Jati, 2015:12).

Tabel 1

Perkembangan Penduduk Menurut Kegiatan

Uraian	Satuan	2016 Agustus	2017 Agustus	2018 Agustus	2019 Februari
Penduduk Berumur 0+ Tahun	Jiwa	259.233.26 3	262.409.04 2	265.522.75 3	267.050.91 0
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	Jiwa	189.096.72 2	192.079.41	194.779.44 1	196.462.76

			6		5
Angkatan Kerja	Jiwa	125.443.74 8	128.062.74 6	131.005.64 1	136.183.03 2
Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	63.652.974	64.016.670	63.773.800	60.279.733
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,34	66,67	67,26	69,32
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,61	5,50	5,34	5,01

Sumber: BPS

Meskipun tingkat penyerapan tenaga kerja cukup tinggi (94,99%) dan jumlah pengangguran terbuka relatif rendah (5,01%), namun kualitas angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki masih cukup rendah. Angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD, SMP, atau bahkan yang tidak memiliki pendidikan. Hanya sebesar 29,95% angkatan kerja merupakan lulusan SMA/SMK; 2,88% lulusan diploma; dan 9,88% lulusan universitas.

Adapun karakteristik tenaga kerja Indonesia berdasarkan status dan jenis pekerjaan utama diuraikan sebagai berikut:

1. Belum pernah sekolah & tidak tamat SD

Mayoritas melakukan kegiatan usaha (berusaha) dan bekerja di bidang pertanian/kehutanan/perburuan/ perikanan.

2. SD & SMP

Mayoritas berusaha dan bekerja di bidang pertanian/kehutanan/perburuan/ perikanan atau bidang produksi/operator alat angkutan/pekerja kasar.

3. SMA & SMK

Mayoritas menjadi karyawan dan bekerja di bidang produksi/operator alat angkutan/pekerja kasar.

4. Diploma

Mayoritas menjadi karyawan dan bekerja di bidang professional/teknisi.

5. Universitas

Mayoritas menjadi karyawan dan bekerja di bidang professional/teknisi.

Tabel 2

Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kegiatan, Feb2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	% Pengangguran Terbuka terhadap Angkatan Kerja	% Angkatan Kerja	% Kerja terhadap Penduduk Usia Produktif
Belum pernah sekolah	99,07	0,93	2,81	60,59
Tidak tamat SD	97,48	2,52	12,71	68,26

SD	97,08	2,92	24,01	70,56
SMP	94,96	5,04	17,77	56,31
SMA	93,22	6,78	18,20	70,68
SMK	91,37	8,63	11,75	79,09
D1-D3	93,11	6,89	2,88	78,59
Universitas	93,76	6,24	9,88	88,47
Total	94,99	5,01	100,00	69,32

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3
Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan
Utama, Februari 2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	% Berusaha terhadap Jumlah Bekerja	% Buruh/ Karyawan terhadap Jumlah Bekerja	% Pekerja Bebas terhadap Jumlah Bekerja	% Pekerja Keluarga terhadap Jumlah Bekerja	% Bekerja
Tidak sekolah	57,63	6,02	11,23	25,12	2,93
Tidak tamat SD	53,54	15,92	13,39	17,15	13,04
SD	47,42	22,42	13,08	17,07	24,53
SMP	40,04	33,14	9,35	17,47	17,76
SMA	35,13	49,14	4,25	11,48	17,86
SMK	28,34	59,76	3,88	8,03	11,31
D1-D3	22,73	71,80	0,35	5,11	2,82
Universitas	14,60	81,36	0,30	3,74	9,75
Total	38,96	39,13	8,18	13,73	100,00

Sumber: BPS, diolah

Tabel 4
Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan
Utama, Februari 2019

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	% Tenaga Profesional/ Teknisi	% Tenaga Kepemimpinan/ Tatalaksana	% Tenaga Tata Usaha	% Tenaga Usaha Penjualan	% Tenaga Usaha Jasa	% Tenaga Usahan/ Pertanian/ Kehutanan/ Perikanan	% Tenaga Produksi/ Operator Alat Angkutan/ Pekerjaan Kasar	% Tenaga Lainnya
Belum pernah sekolah	0,52	0,10	0,12	9,31	3,86	71,33	14,69	0,08
Tidak tamat SD	0,33	0,07	0,13	14,08	5,98	54,09	25,01	0,31
SD	0,60	0,44	0,43	16,81	6,72	42,99	31,50	0,51
SMP	1,39	0,70	1,39	21,22	8,21	26,61	39,40	1,07
SMA	5,98	1,84	9,21	24,83	6,91	15,48	31,51	4,25
SMK	5,16	1,32	10,03	21,91	7,23	9,39	41,32	3,65
D1-D3	32,43	3,12	22,52	17,16	6,21	5,58	12,09	0,88
Universitas	45,72	6,11	21,02	12,14	3,63	3,83	6,28	1,27
Total	7,48	1,40	5,84	18,58	6,58	28,78	29,67	1,68

Sumber: BPS, diolah

Rendahnya kualitas tenaga kerja ini juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan karena tingkat pendidikan memiliki hubungan positif terhadap penghasilan yang diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi tingkat penghasilan yang diterima.

Pembangunan Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan

Sejak akhir tahun 2015, fokus pembangunan dunia telah beralih dari Tujuan Pengembangan Millennium (*Millennium Development Goals/MDGs*) menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Fokus dan tujuan pembangunan negara-negara di dunia menjadi jauh lebih komprehensif dengan penekanan tujuan tidak hanya pada *outcome* dan kesejahteraan, tetapi juga pada aspek keadilan, inklusivitas, serta cara pencapaian tujuan.

Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan tersebut, pembangunan manusia memiliki peran yang mendasar karena manusia tidak hanya sebagai pelaku pembangunan, tetapi juga penikmat hasil pembangunan, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup. Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak hanya dilakukan pada usia produktif, namun dilaksanakan di sepanjang siklus hidup individu tersebut dengan cakupan pembangunan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Agenda pembangunan berkelanjutan untuk aspek pendidikan ditujukan untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat. Tujuan pembangunan ini dirincikan dalam beberapa target pencapaian tahun 2030 sebagai berikut:

1. Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif;
2. Menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, dan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar;
3. Menjamin akses yang sama bagi semua anak perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas;
4. Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan;
5. Menghilangkan disparitas *gender* dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi masyarakat rentan, termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli dan anak-anak dalam kondisi rentan;
6. Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi;
7. Menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan *gender*, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global, serta penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018).

Pelaksanaan agenda pembangunan serta pencapaian target dan tujuannya tersebut bukan hanya merupakan “pekerjaan rumah” bagi pemerintah. Hal ini membutuhkan komitmen dan kemitraan yang erat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, universitas, dan masyarakat.

Tantangan dan Peran Perguruan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kunci bagi inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga manusia memiliki keahlian dan kreativitas untuk menghadapi persaingan dalam dunia kerja yang semakin tinggi. Meskipun demikian, realisasi menunjukkan bahwa hanya sebesar 10,28% penduduk usia produktif atau 12,76% angkatan kerja yang memiliki pendidikan tinggi, baik tingkat diploma maupun strata (universitas).

Sebagaimana dijelaskan dalam Handayani (2015:53), apabila rendahnya partisipasi terhadap pendidikan tinggi ini terus berlanjut, maka prediksi McKinsey Global Institute/MGI dapat terjadi, yakni bahwa pada tahun 2030, Indonesia dapat mengalami kekurangan tenaga

kerja terdidik dan terampil, tetapi kelebihan tenaga kerja non-terampil. Hal ini sejalan dengan data International Labour Organization/ILO pada tahun 2015 bahwa proporsi tenaga kerja yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan keterampilan akan mencapai lebih dari separuhnya. Kesenjangan tersebut kemudian akan diisi oleh tenaga kerja asing.

Salah satu penyebab besarnya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja terdidik dan terampil di Indonesia adalah tersentralisasinya perguruan tinggi di wilayah Jawa Bali yang memiliki kepadatan penduduk yang besar. Meskipun institusi pendidikan tinggi di Indonesia telah mencapai 4.670 institusi, namun angka partipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) untuk perguruan tinggi per tahun 2018 masing-masing hanya mencapai 25,12% dan 18,59%.

Gambar 1 Perguruan Tinggi di Indonesia, 2019

Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti

Mahalnya biaya pendidikan juga turut menyebabkan rendahnya jumlah tenaga kerja terdidik dan terampil. Menurut Elmira dan Suryadarma (2018), skema pendanaan perguruan tinggi yang sepenuhnya ditanggung oleh mahasiswa akan membatasi kesempatan anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat pendapatan rendah dan keluarga miskin. Di lain pihak, subsidi penuh untuk pendidikan akan memberikan beban terhadap penerimaan sehingga distribusinya masih terbatas dan belum merata.

Salah satu bentuk penanganan yang telah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah penerapan pendidikan jarak jauh (PJJ) dengan konsep *e-learning*. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah memberikan kesempatan bagi institusi perguruan tinggi untuk melaksanakan program pembelajaran tersebut dengan jaminan mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain menekan biaya pendidikan, PJJ memberikan aksesibilitas bagi masyarakat di daerah yang jauh dari institusi pendidikan tinggi ataupun yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka (regular).

Pada pertengahan tahun 2019, hanya terdapat sekitar 15-20 institusi yang melaksanakan PJJ, dengan jumlah yang lebih terbatas untuk penerapan *e-learning*. Jumlah ini diharapkan akan meningkat pada tahun selanjutnya seiring dengan agenda transformasi dunia pendidikan dan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan jumlah institusi yang menerapkan konsep tersebut. Potensi ini juga disertai dengan tantangan untuk meningkatkan daya serap atau pemahaman peserta didik.

Selain kuantitas, kualitas tenaga kerja terdidik dan terampil juga masih terbatas sehingga kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Menurut Handayani (2015), pertumbuhan jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang massif tidak diikuti dengan peningkatan kualitas yang memadai. Selain penyediaan sarana pra-sarana dipandang masih terbatas, pembukaan perguruan tinggi baru juga masih didominasi orientasi *profit* sehingga jumlah lulusan akan terus meningkat, tetapi kurang berkualitas.

Lebih lanjut, Wiratno (2012) menjelaskan keterbatasan daya saing ketenagakerjaan Indonesia juga ditunjukkan melalui beberapa indikator berikut:

1. Kompetensi lulusan perguruan tinggi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dunia kerja, baik dari segi *academic knowledge*, *skill of thinking*, *management skill* dan *communication skill*.
2. Lulusan perguruan tinggi belum memiliki keterampilan hidup (*live skill*), kemampuan beradaptasi dan kemampuan bersosialisasi (*soft skill*) terhadap lingkungan kerja, serta kemauan belajar sepanjang hayat (*life-long education*) yang diharapkan.
3. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi masih belum sepenuhnya berhasil karena belum adanya standar minimal pelayanan yang sama dalam melayani mahasiswa yang mengikuti program pendidikan kewirausahaan tersebut. Selain itu, unit khusus yang berfungsi mengelola program kewirausahaan ataupun konsultasi bisnis dan penempatan kerja dipandang belum optimal.

Selain perlunya upaya untuk meningkatkan indikator dalam keterbatasan daya saing tersebut, program kewirausahaan juga dapat dikembangkan pada peningkatan kewirausahaan sosial. Menurut Firdaus (2014), upaya perubahan sosial yang berdampak pada keberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan telah memberikan peran nyata dan penting dalam menyelesaikan masalah sosial. Kewirausahaan sosial mendorong perbaikan ekonomi masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

E. PENUTUP

Bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia dan diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga tahun 2030 perlu dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Modal manusia yang terdidik dan terampil perlu ditingkatkan dari sisi jumlah dan kualitas daya saing untuk mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing.

Dalam mengupayakan hal tersebut, perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi perlu memperhatikan aksesibilitas bagi masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan tinggi dengan harga yang terjangkau. Hal ini antara lain dapat dilakukan melalui implementasi perkuliahan jarak jauh dengan konsep e-learning.
2. Perguruan tinggi perlu meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi itu sendiri agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.
3. Perguruan tinggi perlu mendorong peningkatan daya saing lulusannya melalui peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, peningkatan berbagai keterampilan yang diperlukan dan kemauan belajar sepanjang hayat, serta mendorong program kewirausahaan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, Armida S. dan Viktor Pirmana. 2016. *Assessing Indonesia's Long Run Growth: The Role of Total Factor Productivity and Human Capital*. SDGs Center Working Paper Series No. 201616.
- Bappenas. 2017. *Siaran Pers Outlook Pembangunan Indonesia 2018: Pemanfaatan Bonus Demografi*.
- Benos, N.; Zotou, S. Education and economic growth: A meta-regression analysis. *World Dev.* 2014, 64, 669–689.
- Blundell, Richard, dkk. 2000. *The Returns to Higher Education in Britain: Evidence from a British Cohort*. *The Economic Journal* Vol. 110 No. 461: 82–99.
- BPS. 2012. *Analisis Statistik Sosial: Bonus Demografi dan Pertumbuhan Ekonomi*.
- BPS. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*.
- BPS. 2019. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2019*.
- Elmira, Elza dan Daniel Suryadarma. 2018. *Financing Higher Education in Indonesia: Assessing the Feasibility of an Income-Contingent Loan System*. SMERU Working Paper.
- Fahmi, Mohamad dan Yeni Oktavia Mulyono. 2015. *Pendidikan, Human Capital ataukah Signaling? Studi Kasus Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 15 No. 2: 113-120.
- Firdaus, Nur. 2014. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 22 No. 1: 55-67.
- Handayani, Titik. 2015. *Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Kebutuhan Tenaga Kerja di Era Global*. *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 10 No. 1: 53-64.
- Hanushek, E.A.; Woessmann, L. The role of cognitive skills in economic development. *J. Econ. Lit.* 2008, 46, 607–668.
- Hendajanya, Nenny, Tri Widodo dan Eny Sulistyaningrum. 2016. *Perkembangan Tingkat Pengembalian Investasi Pendidikan Antar-Provinsi: Indonesia Family Life Survey 1993–2014*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* Vol. 17 No. 1: 44-57.
- Liping, Liou. 2019. The Impact of Educational Investment on Sustainable Economic Growth in Guangdong, China: A Cointegration and Causality Analysis. *Sustainability*, 11, 766; doi:10.3390/su11030766
- Jati, Wasisto Raharjo. 2015. *Bonus Demografi sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang atau Jendela Bencana di Indonesia?* *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada* Vol. 23 No. 1: 1-19.
- Wiratno, Siswo. 2012. *Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Tinggi*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol. 18 No. 4: 453-466.